



Penataan PKL Harus Matang

Menuju Konsep Semipedestrian Malioboro

Pemkot (Yogyakarta) bisa memfasilitasi itu bekerja sama paguyuban PKL.

DR Hempri Suyatna
Kepala Pusat Studi Kajian Pembangunan UGM

YOGYA. TRIBUN - Evaluasi pada penyelenggaraan uji coba semipedestrian Malioboro harus menyeluruh. Untuk pedagang kaki lima (PKL) pun harus segera ditata dengan baik agar mendukung konsep tersebut.

Kepala Pusat Studi Kajian Pembangunan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, DR Hempri Suyatna menjelaskan, pe-

• ke halaman 15

Penataan PKL Harus Matang

• Sumbangan Hal 9

nataan PKL harus secara pelan-pelan dilaksanakan. PKL pun juga harus disadarkan dan mau untuk tertibkan. "Pemkot (Yogyakarta) bisa memfasilitasi itu bekerja sama paguyuban PKL," kata Hempri, Senin (1/7).

Menurutnya, aksi *Reresik* Malioboro yang sudah jalan bisa diteruskan. Hal ini bisa dilakukan dengan semacam lomba atau kompetisi kebersihan antarPKL. Meski demikian, di sisi lain fasilitas pembuangan sampah, pembuangan air limbah harus

diperhatikan. Standarisasi harga, kualitas makanan juga perlu dijaga. "Jangan ada PKL yang *nutuk* harga," jelasnya.

Adapun, untuk evaluasi harus meliputi berbagai aspek. Di antaranya adalah terkait dampak ekonomi PKL, mobilitas pengendara sepeda motor dan mobil. Untuk pejalan kaki juga harus dievaluasi sejauh mana kenyamanannya.

"Terkait keluhan pengusaha di Malioboro, penting diperbanyak tempat parkir di beberapa kantong. Andong dan becak juga perlu diperbanyak," jelasnya.

Sekda DIY, Gatot Saptadi menjawab beberapa keluhan para pengusaha di seki-

tar Malioboro mengenai penurunan omzet. Dia berharap uji coba ini bukan hanya event *sehari* tapi bisa dilaksanakan terus-menerus.

Adanya wacana bus untuk tidak masuk kota pun akan dipertimbangkan. Hanya, komitmen dari pemerintah kota mengenai kebijakan ini pun harus tegas. Hal ini karena menyangkut penyiapan kantong parkir untuk bus yang kemudian akan dibarengi dengan kebijakan lain.

"Kalau memang iya (pemkot setuju), ya, difasilitasi. Kami ingin kebijakan sepraktis apa pun dipraktikkan biar tidak hanya menjadi teori saja untuk uji coba ini," urainya. (ais)

Instansi

1.

Negatif Amat Segera Untuk Ditanggapi

Jadikan Tempat yang Humanis

WAKIL Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto menjelaskan, mewujudkan kawasan semipeDESTRIAN itu harus mampu juga menciptakan kawasan yang sangat humanis. Artinya, Malioboro mampu menghadirkan kembali roh hubungan sosio-kultural kemasyarakatan.

"Jangan sampai nanti bobotnya

● ke halaman 15

Jadikan Tempat yang Humanis

● Sambungan Hal 9

terlalu ke dimensi atau roh ekonomi semata-mata, apa pun itu baik dari seluruh pemangku kepentingan yang menjadikan kawasan Malioboro

untuk menyambut rezeki. Oleh karena itu maka penataan yang sudah dilakukan dan selalu dikaitkan dengan sumbu imajiner dengan sumbu filosofis terutama sumbu filosofis itu," katanya.

Dalam penataan ini kalangan difabel sudah menyampaikan kritik bahwa berbagai fasilitas penunjang aktivitas

mereka dirasa kurang optimal. Maka, Dinas PU harus segera menindaklanjuti. Selain itu menghidupkan dimensi sosio-kultural terutama dari kulturalnya harus dijaga.

"Saya sangat-sangat berharap melalui uji coba ini jika ada kekurangan yang kemudian rekomendasinya dikaji dan dievaluasi menjadi kebijakan," paparnya.

Ke depannya, Malioboro diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Baik difabel, penyandang *down syndrome* dan kelompok masyarakat lainnya. "Malioboro tidak menjadi tempat eksklusif tapi inklusif dan nyaman bagi semua kalangan," urainya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005